

**Title** : KERJASAMA INDONESIA -MALAYSIA DALAM MENJAGA STABILITAS GEOPOLITIK KEAMANAN MARITIM WILAYAH NUSANTARA PERSPEKTIF KONSTRUKTIVISME

**Author(s)** : Laode Muhamad Fathun

**Institution** : UPN Veteran Jakarta

**Category** : Article, Competition

**Topic** : Politic

# **KERJASAMA INDONESIA -MALAYSIA DALAM MENJAGA STABILITAS GEOPOLITIK KEAMANAN MARITIM WILAYAH NUSANTARA PERSPEKTIF KONSTRUKTIVISME**

**Laode Muhamad Fathun**  
**UPN Veteran Jakarta**

[Laodemuhammadfathun@upnvj.ac.id](mailto:Laodemuhammadfathun@upnvj.ac.id)

## **Pendahuluan**

Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang serumpun yang berada di Kawasan Asia Tenggara. Kedua negara juga terhimpun dalam ASEAN sebagai intitusi yang menaungi negara-negara Asia Tenggara. Selain itu kolaborasi Indonesia dan Malaysia juga ada dalam berbagai organisasi lainnya seperti G20, Indo, Pasifik, IORA, PBB dan masih banyak lagi. Artinya pertemuan yang sering dilakukan oleh kedua negara membuka peluang kolaborasi dan sinergi dalam bekerjasama dalam berbagai bidang. Walaupun peluang dan tantangan kerjasama antar kedua negara selalu mengalami dinamika.

Secara geopolitics kedua negara saling berbatasan langsung baik darat maupun laut. Perbatasan wilayah daratan antara Indonesia -Malaysia adalah Pulau Kalimantan yang berbatasan dnegan Serawak, Sebatik dan Sabah. Selain itu, perbatasan laut terdiri atas Selat Malaka, Selat Sulawesi dan Selat Laut China Selatan. Menyikapi perbatasan ini harus disikapi dengan kepala dingin dan mengutamakan pendekatan dialog negosiasi. Sebagai dua negara yang memiliki karakter has melayu maka pendekatan komunikasi adalah pilihan rasional kedua negara. Mengapa ini penting, karena sering kali kedua negara bersitegang dalam membahas isu perbatasan Karena memang dalam kajian geopolitik negara akan memikirkan dua hal yakni physical future atau bagaimana fisik negara tersebut dimaknai, diinterpretasikan, didesain. Selain itu ada political behaviour atau bagaimana kebijakan dan aksi negara dalam menyikapi bentuk fisik tersebut (Sri, 2007).

Wilayah Indonesia dan Malaysia berbatasan langsung dengan lautan. Indonesia memaknai laut bukan hanya sebagai batas negara tetapi juga sebagai identitas, media komunikasi dan tempat ketersediaan sumberdaya. Laut memiliki kedaulatan politik, hukum, social dan budaya. Indonesia memaknai keseluruhan laut yang dimilikinya sebagai wawasan geopolitik Nusantara. Nusantara adalah paradigma berfikir Indonesia yang menilai wilayah laut merupakan warisan sejarah, warisan kekuasaan dan warisan ekonomi. Sejak zaman kerajaan Singosari, Majapahit, Samudera Pasai, Kerajaan Gowa, Kerajaan Tidore, Kesultanan Buton dan sejumlah kerajaan lain merupakan bukti kongkrit kekuasaan laut Nusantara dizaman pra sejarah.

Salah satu wilayah penting yang menjadi bagian kerjasama antara kedua negara adalah wilayah Indo Pasifik. Indo -Pasifik ini bukan merujuk pada wilayah geografis yang terbentang mencakup wilayah Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Kerjasama ini berorientasi pada tiga hal yakni kerjasama maritime, konektivitas dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia dan Malaysia yang secara postur geografi adalah negara kepulauan maka kedua negara berpotensi melakukan kerjasama dan kolaborasi pada kerjasama maritime dan konektivitas. Namun Tulisan ini akan lebih membahas kerjasama maritime antara kedua negara dalam menjaga stabilitas wilayah Nusantara terutama ancaman keamanan maritime baik tradisional maupun non tradisional.

Mengapa ini penting, karena 1) kedua negara memiliki batas wilayah darat dan laut yang harus sering dikomunikasikan. Terutama batas laut karena postur laut berbeda dengan darat. Laut lebih berpotensi menjadi sumber konflik karena abrasi, geologi dan hidrologi serta interpretasi hukum yang berbeda: 2) kedua negara masih memiliki ancaman yang sama baik ancaman keamanan maritime tradisional maupun non tradisional seperti pencurian ikan, perompakan, narkoba dan perompakan 3) kedua negara memiliki satu perbatasan penting yang menjadi jalur perdagnagan dunia yakni Selat Malaka yang menjadi salah satu jalur tersibuk di dunia untuk logistic perdagangan.: 4) kedua negara selalu terlibat dalam berbagai kerjasama organisasional untuk menjaga stabilitas wilayah ASEAN dan Nusantara misalnya IORA, ARF, MASLINDO dan selainya serta 5) kedua negara memiliki karakter rumpun Melayu. Karakter orang melayu selalu berkomunikasi dengan hati ( Venus, 2015) ( Fathun, 2018). Atau sederhananya adalah rumpun Melayu selalu menggunakan pendekatan komunikasi, diplomasi dan negosiasi dalam menyelesaikan masalah. Oleh sebab itulah melihat wilayah Nusantara memiliki peluang dan tantangan yang harus dikolaborasikan agar bisa mendapatkan manfaat bagi semua pihak.

### **Struktur Geopolitik Maritim Nusantara**

Pemaknaan tentang geopolitik pada intinya berbicara tentang hubungan manusia dengan bumi. Sederhannya adalah bagaimana cara hidup manusia untuk berdampingan dengan alam. Sejak zaman sejarah manusia telah ditunjukkan kisah manusia purba dalam bertahan hidup. Situasi ini membawa manusia berevolusi dan hidup berpindah-pindah dari suatu tempat ketempat lainnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk adaptasi perubahan situasi untuk bisa bertahan hidup. Dari masa pra sejarah ini kita ditunjukkan bagaimana manusia bisa berdampingan dengan alam bahkan alam menyediakan segalanya buat manusia. Alam atau bumi ( geo) sebagai tempat hidup manusia untuk bertahan hidup dan memaknai hidup.

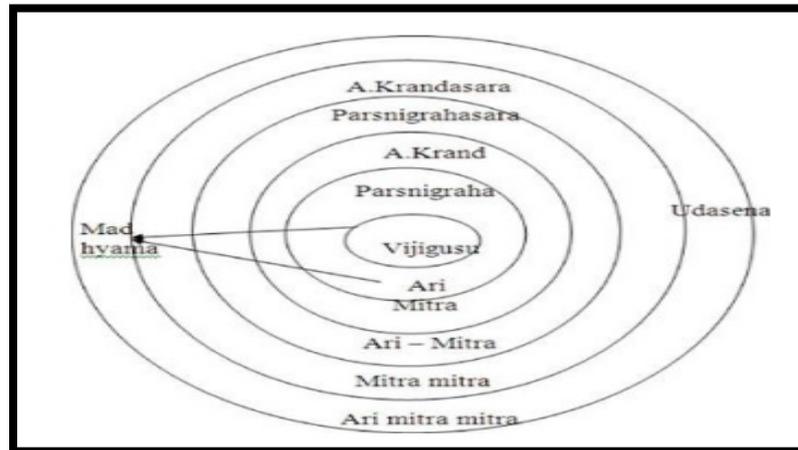
Sedangkan politik adalah cara manusia untuk bertahan dengan kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Dengan demikian geopolitik seperti yang dikatakan oleh *Griffith menyatakan bahwa: Geopolitics is the study of the influence of geographical factors on state behaviour – how location, climate, natural resources, population, and physical terrain determine a state's foreign policy options and its position in the hierarchy of states* (Griffiths, 2007).

Pemikiran tentang geopolitik berkembang sekitar abad ke 19 hingga 20an. Beberapa tokoh terkenal dari pemikiran geopolitik seperti Albert Demangeon, Louis Febure, Andre Siegfried dan Jacques Ancel, Rudolf Kjellen, Ratzel adalah sejumlah tokoh yang menyumbangkan pemikiran tentang geopolitik. Namun ada dua tokoh penting dari beberapa nama di atas yaitu Kjellen dan Ratzel. Kjellen adalah tokoh yang mengembangkan teori negara yang berbasis pada pendekatan biologis. Menurutnya negara seperti halnya makhluk hidup yang memiliki morfologi dan struktur yang mempengaruhi agar bisa bertahan hidup. Faktor ekonomi, social, budaya, politik, hukum dan mungkin saja saat ini ditambah dengan integrasi teknologi informasi merupakan cara negara untuk bisa beradaptasi. Kajian hubungan antar manusia dan alam bisa disebut dengan science of state atau *living space*. Selanjutnya, Ratzel juga mengembangkan bahwa negara seperti halnya makhluk hidup atau human geography, human determinist yang membutuhkan wilayah untuk hidup. Konsep inilah yang menjadi dasar terjadinya imperialisme dan perang global pada abad ke 18-19. Ratzel menyebut Lebensraum sebagai strategi negara untuk bisa bertahan (Sri, 2007).

Selain itu, Teori Non Barat atau Teori Mandala merumuskan enam fondasi lingkungan strategis yang akan dikeluarkan oleh negara dalam situasi yang berbeda. Adapun enam istilah tersebut adalah a) **Sandhi** yang dimaknai dengan sebagai bentuk kebijakan untuk terlibat dalam perjanjian aliansi. Tujuannya adalah untuk memperkuat pembangunan serta memperkuat kekuatan untuk mengalahkan lawan, **Vigraha** merupakan kebijakan konfrontatif yang bisa dilakukan oleh Negara yang kuat. Kebijakan ini sebagai bentuk penunjukan kekuatan diantara penguasa, **Asana** merupakan kebijakan bersikap netral ketika negara tersebut memiliki status negara yang sama, **Yana** adalah kebijakan rasional Negara untuk memutuskan berperang. Hal ini menyangkut kalkulasi kekuasaan dan kekuatan. Logistik dan bala tentara, **Samsraya** merupakan kebijakan yang meminta perlindungan kepada Negara yang memiliki kekuasaan dan kekuatan tertinggi agar tidak mudah diekspansi. Hal ini biasanya dilakukan oleh Negara kecil dan **Dvaidhibhava** adalah kebijakan yang dirumuskan untuk meminta perlindungan damai dari raja tertentu agar bisa memperoleh kekuatan untuk bisa bermusuhan dengan raja lainnya. Penulis menyimpulkan bahwa dari enam pola kebijakan luar negeri di atas setidaknya menunjukkan empat hal yakni Negara kuat (*great power*) yakni **Sandhi** dan **Vigraha**, kemudian

Negara netral atau *middle power* yakni **Asana**, Negara lemah (*less power*) atau **Samsraya** dan negara bermuka dua atau *raison the state* serta **Dvaidhibhava** dan Negara *deliberative state* atau **Yana** (Shahi, 2019) (Bist, 2020) (Dellios, 2003).. Berikut adalah formulasi kebijakan luar negeri dan diplomasi dalam konteks teori Mandala:

**Figure 1 Lingkaran Konsentris dalam Teori Mandala**



Sumber: (Rajeev, 2011)

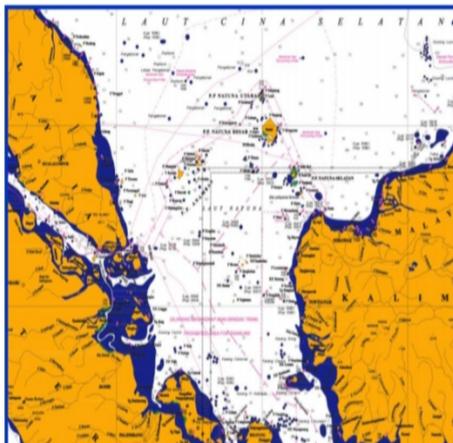
Penulis menyimpulkan bahwa geopolitik adalah cara negara beradaptasi dalam lingkungan strategisnya untuk itu penulis menyimpulkan beberapa indikator penting untuk bisa memahami dan beradaptasi dengan situasi lingkungan geopolitik yang berubah. Sehingga negara harus memiliki motivasi untuk beradaptasi. Sebab hubungan manusia dengan alam dibangun dari persepsi dan konstruksi social yang harus dieksekusi. Adapun beberapa indikator tersebut adalah:

- a) *strategic room*, bisa dimaknai dengan bahwa negara tidak ubahnya seperti makhluk hidup lain yang membutuhkan ruang untuk bertahan dan beradaptasi dan berinovasi;
- b) *two level game*, bisa dimaknai dengan bahwa kehidupan negara akan dipengaruhi oleh dua factor dominan yaitu factor lingkungan internal dan eksternal yang selalu jadi central mystery.
- c) *polarization and distribution of power*, dimaknai dengan bagaimana pembagian dan polarisasi kekuasaan dan kekuatan dalam lingkungan hidup negara. Negara harus bisa memetakan siapa yang menjadi teman, sahabat, lawan serta apa-apa yang dimiliki oleh mereka. Konteksnya adalah pilihan rasional dan untung rugi.
- d) *instrumental tools*, dimaknai dengan bagaimana negara bisa memahami keamanan, ketahanan dan ancaman yang dihadapinya. Intrumen untuk bertahan bisa dengan *smart power, hard power, dan soft power*.

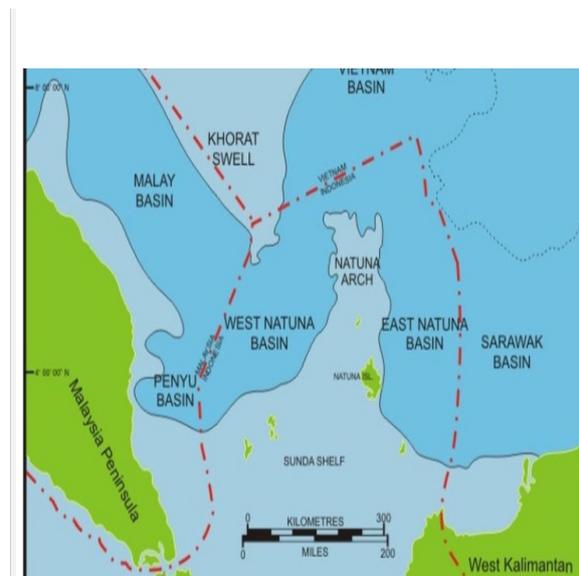
- e) *Social culture*, dimaknai dengan bagaimana negara tersebut memiliki karakter moral, motivasi, budaya, sejarah, adat istiadat yang membangun identitas negara tersebut
- f) *technological tools*, dimaknai dengan instrumen teknologi bisa menjadi pelengkap dalam perilaku negara dalam menghadapi ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar.

Menurut penulis enam indikator di atas sangat penting jika dipakai dalam memaknai dan menjaga stabilitas Kawasan Nusantara yang kaya akan potensi ekonomi, politik, hukum dan social budaya. Aktor yang terlibat harus bersinergi dan berkolaborasi untuk bisa menjadikan enam indikator tersebut sebagai landasan bergerak dalam merumuskan kebijakan yang berujung pada kebijaksanaan domestic dan kebijaksanaan luar negeri. Karena tidak semua perilaku negara yang dituangkan dalam bentuk kebijakan bernilai kebijaksanaan. Berikut adalah wilayah geografis Nusantara yang memiliki letak strategis dan memiliki potensi ekonomi yang besar:

**KONSEP PENETAPAN BATAS ZEE  
INDONESIA - MALAYSIA DI LAUT CHINA SELATAN**



Sumber : KEMENHAN RI



Sumber: Kompas.com



Sumber: Beritasatu.com

Dinamika hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia selalu mengalami pasang surut. Rivalitas dua negara rumpun melayu ini selalu menyita perhatian negara-negara Asia Tenggara. Masa kelam hubungan bilateral keduanya ketika terjadi konflik dalam memperebutkan pulau Sipadan dan Ligitan dimasa pemerintahan Megawati yang akhirnya kedua pulau tersebut menjadi milik Malaysia. Saat ini rivalitas kedua negara selalu memiliki dinamika terutama ditiga posisi batas laut di atas yaitu pulau Natuna, Selat Malaka dan Selat Laut China Selatan. Karena postur, kultur dan struktur negara kepulauan berbeda dengan negara pantai seperti Singapura maka pendekatan diplomatik merupakan pendekatan yang efisien dan rasional bagi kedua negara. Indonesia memaknai kepemilikan laut sebagai warisan Nusantara, sehingga harus dijaga dengan baik kepemilikan kedaulatannya. Namun rivalitas yang selalu tinggi antar kedua negara, menurut penulis yang harus dicari adalah persamaan antarkedua negara sehingga bisa menciptakan identitas kolektif seperti yang dikatakan oleh Alexander Wendt. Penjelasan ini akan di bahas pada poin selanjutnya.

### **Kolaborasi Indonesia-Malaysia dalam Menjaga Stabilitas Wilayah Nusantara**

Impelementasi teori geopolitik maritim di wilayah nusantara tidak lepas dari cara negara dalam menyikapi dan memaknai lingkungan strategisnya atau *strategic room*. Lingkungan strategis ini menjadi pemicu bagaimana negara bersikap dan bertindak dalam merumuskan, mengimplementasikan serta mengevaluasi kebijakan luar negerinya. Kondisi ini berhubungan dengan tiga dimensi yaitu struktur, postur dan kultur. Pada poin lingkungan strategis berhubungan dengan struktur atau proses pengambilan kebijakan luar negeri. Dalam hal ini berpengaruh pada postur negara tersebut seperti apa. Seperti halnya Indonesia yang mengambil kebijakan luar negeri Poros maritim Dunia atau *global Maritime Axis* (Komeini, 2018).

Arah kebijakan politik luar negeri Jokowi membawa Indonesia memasuki abad “*geopolitics*” dalam orientasi maritim seperti yang dikatakan oleh Gearoid O. Tuathail. Konsep ini didasarkan pada transformasi sifat negara yang *libensraum*, dimana setiap negara berlomba memperebutkan kekuasaan dominasi baik negara kecil maupun negara besar dalam spasial dunia. Pendekatan ini mengacu pada hubungan keseluruhan antara politik dan geografi, ekonomi dan secara khusus berkaitan dengan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Atau dalam bahwa seorang ahli Knox Paul bahwa “*is the state 's power to control space and territory and shape foreign policy of individual states and international political relations*” (Suprianto, 2014) (Tuathail, 1998) (Tuathail, 1998). Artinya kebijakan luar negeri Jokowi hasil dari interpretasi dari lingkungan strategisnya. Lebih lanjut, (Holsti, 2016) mengatakan bahwa kebijakan politik luar negeri bukan hanya permainan kekuasaan dan strategi, tetapi diresapi dengan ide, mitos, dan bahkan agama. Istilah reorientasi mengacu pada niat pembuat kebijakan

untuk melakukan restrukturisasi hubungan bangsa mereka dengan negara lain. Untuk sebagian besar negara, hubungan eksternalnya, berbagai tindakan dan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan yang aktor lain terkadang secara acak diarahkan melintas batas negaranya. Dalam menganalisis kebijakan politik luar negeri dibagi menjadi sejauh mana pengaruh faktor struktural (kendala yang diberlakukan oleh sistem internasional) dan agensi manusia (peran pilihan individu dalam membentuk sistem internasional) dan ketika menganalisis keputusan kebijakan politik luar negeri dan lingkungan pengambilan keputusan. Oleh sebab itulah kebijakan luar negeri adalah kisah yang selalu berubah tentang bagaimana negara, institusi dan orang-orang saling terlibat dalam internasional yang dinamis (Chris Alden, 2017).

Analisis tentang psotru dan struktu Nusantara maka dalam konteks geopolitik terdiri atas dimensi berikut: a) *Enviromental setting Man Melieu Relationship Environmentl determinism* pada poin ini pengaruh geografi dalam keputusan b) *Free will Environmentalism*, pada poin ini menunjukkan lingkungan alam c) *Environmental posibilism* peranan teknologi d) *Cognitive* pada poin ini berhubungan dengan behaviouralism kondisi keilmuan e) *Environmental probalism* prediksi normalitas Lingkungan sangat menentukan gerak dan perilaku negara dalam (Hara, 2011). Dengan demikian jika dilihat dari segi postur dua negara antara Indonesia dan Malaysia terletak pada situasi geopolitik diantaranya *Compact*, yaitu bentuk yang solid tidak terpisah oleh wilayah, lautan atau diselingi wilayah negara lain. Contoh : Swiss, Romania, Hongaria, India. *Circular*, yaitu bentuk yang hampir bulat seperti Perancis dan Polandia. *Long-Narrow*, yaitu bentuk negara yang panjang dan pipih seperti Chile dan Vietnam. *Divided & Separated*, yaitu bentuk negara yang terpisah oleh lautan atau dipotong oleh negara lain. Contoh : Mesir, Turki, Malaysia, AS, dan negara kepulauan (Sri, 2007). Bentuk terakhir relevan dengan wilayah Nusantara ayau *archipelago state*.

Kemudian dilihat dari kombinasi *two level game* artinya atau kombinasi factor internal dan eksternal dalam perumusan kebijakan luar negeri ditinjau dari lingkungan strategis. Setiap negara di dunia memiliki kepentingan nasional yang harus dicapai. Kepentingan nasional tersebut ditempuh melalui formulasi kebijakan luar negeri sebagai prinsip dalam keikutsertaan negara dalam politik internasional. Rosenau mengatakan bahwa kebijakan luar negeri sebuah Negara untuk mengambil keuntungan dari lingkungan eksternalnya tentunya untuk mempertahankan kehidupan Negara sehingga analisis kebijakan luar negeri sebuah Negara sangat kompleks menyangkut (*internal life*) dan (*eksternal needs*). (Rosenau, 1971) (Rosenau 1974) (Rosenau, 1981). Dalam artian pendekatan yang ada sistemik dan analitik yang bertumpu

pada kebutuhan internal dan eksternal. Namun yang perlu dipahami adalah kebijakan luar negeri merupakan sebuah peristiwa yang *central mystery* yang akan susah ditebak objeknya secara komprehensif. Hal ini didasarkan pada akan susah menemukan informasi yang 100% murni tentang proses perumusan kebijakan luar negeri sebuah Negara. Objeknya memang ada tetapi sifatnya kabur (Warsito, 1998). Kombinasi dua level domestic dan internasional adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan keberhasilan Politik Luar Negeri Indonesia, yaitu: a) Letak geografis dan struktur fisik . b) Sejarah Perjuangan Bangsa, c) Faktor penduduk, d) Faktor kekayaan alam, e) Faktor kekayaan budaya, f) Kualitas pelaksanaan diplomasinya, g) Kekuatan militer h) Faktor ideologi negara. I) Situasi internasional, i) Bantuan Luar negeri, k) Kepemimpinan dan birokrasi, l Teknologi informasi (Isnarti, 2021).

Kemudian, dimensi *polarization and distribution of power*, pada poin ini tantangan wilayah Nusantara adalah rivalitas dua *great power* yaitu China dan Amerika Serikat. Kemudian munculnya India sebagai kekuatan *big power* dalam meramaikan lingkungan strategis Kawasan Nusantara dan Indo Pasifik. Rivalitas kebijakan luar negeri karena melihat lingnya strategis Nusantara dan Kawasan Indo -Pasifik sebagai sumber kekuatan dan polarisasi kawan dan lawan maka kedua negara dan ditambah India masing-masing mencari mitra strategis. China mengambil kebijakan *Belt Road Initiative* dan Amerika Serikat dengan *Pivot To Asia*. Rivalitas ini menjadikan negara-negara di Nusantara harus mengambil posisi terhadap polarisasi dan distribusi kekuasaan (Muzakki, 2019).

Indonesia dan Malaysia adalah negara yang memiliki karakter Middle Power. Artinya kekuatan di level menengah. Artinya kedua negara harus saling merangkul dan bersinergi untuk menciptakan kekuatan regional yang tangguh sebagai poros kekuatan yang tidak dikontrol oleh kedua negara besar tersebut. Indonesia dan Malaysia harus bisa mandiri dalam menyikapi rivalitas tersebut. Misalnya menciptakan poros Indo- Melayu sebagai poros baru dalam distribusi dan polarisasi kekuasaan dan kekuatan. Thies dan Sari mengusulkan 'pendekatan teori peran' untuk memahami kekuatan menengah, menilai kualifikasi suatu negara sebagai perantara kekuatan oleh tolok ukur peran bahwa kekuatan menengah secara tradisional diharapkan untuk melakukan, yang termasuk menjadi warga negara internasional yang baik, pembangun koalisi, pembangun jembatan, penjaga perdamaian, mediator konflik pihak ketiga, dan pendukung multilateralisme dan tatanan internasional yang dipimpin AS saat ini. Swielande berpendapat bahwa lima karakteristik kekuatan menengah, yaitu kapasitas mereka, konsepsi diri, status, dampak regional dan dampak sistemik (Anwar, 2020). Dan Indonesia-Malaysia memenuhi syarat tersebut.

Dimensi berikutnya adalah *instrumental tools*, pada poin ini berhubungan dengan cara menyikapi polarisasi dalam lingkungan strategis di Kawasan Nusantara. Hal yang menarik dari menyikapi karakter Indonesia dan Malaysia adalah berada pada satu rumpun etnis melayu. Dengan demikian hal ini juga menyangkut dimensi social culture kedua negara yaitu selalu mengedepankan komunikasi. Artinya karakter komunikasi orang melayu adalah berdiplomasi dengan hati (Venus, 2015). Mengapa menggunakan hati, karena orang melayu dibekali budaya, adat, karakter oleh nenek moyang mereka. Tata krama, kesopanan, bijaksana adalah sejumlah poin penting dalam komunikasi orang melayu. Sehingga pendekatan yang tepat dalam instrument kebijakan luar negeri kedua negara adalah menggunakan *soft power* atau diplomasi dan negosiasi. Indonesia telah menjadikan diplomasi sebagai bagian dari karakter kebijakan luar negeri negara *middle power* yang tertuang dalam Undang-undang No. 37 Tahun 1999. Selain itu dari kultur sosial juga kedua negara memiliki kesamaan keberagaman dan gotong royong dalam membangun kualitas sosial budaya untuk beradaptasi dengan perubahan (Isnarti, 2021).

Dan, dimensi berikutnya adalah *technological tools*, salah satu dinamika yang berubah diversifikasi aktor dan substansi isunya adalah studi dan praktek diplomasi. Diplomasi sendiri berubah karena empat hal : a) sistem internasional yang berubah , b) ancaman dan prevalensi sifat perang c) revolusi peran negara dan d) integrasi teknologi informasi. Teknologi informasi menjadi salah satu bagian dari perubahan hubungan antar negara. Bahkan perubahan arah diplomasi karena a) perubahan lingkungan politik, sosial, dan ekonomi di mana diplomasi dilakukan (misalnya sifat dan distribusi kekuasaan, jenis konflik baru, dan sifat kedaulatan yang berubah dan saling ketergantungan dalam hubungan internasional), b) Munculnya isu kebijakan baru dalam politik luar negeri seperti *cybersecurity*, *privacy*, *data governance*, *e-commerce*, dan *cybercrime* dan c) penggunaan alat digital dalam praktik diplomasi seperti media sosial, konferensi online, dan analisis big data (diplomacy.edu,2021) (Hone, 2021).

Teknologi melahirkan diplomasi digital atau e diplomasi yang membuat negara harus bisa beradaptasi. E diplomacy atau diplomasi digital Menurut *Office of diplomacy United State of America* ada beberapa tujuan dari *e diplomacy* antara lain (Fathun,2012) ;

1. *Bring State Diplomacy into the information Technology decision making process*( membawa diplomat Amerika dalam mengambil keputusan melalui teknologi informasi.):
2. *Improve ways to connect to and collaborate with other inside and outside State and* ( meningkatkan hubungan dan peran serta AS terhadap masyarakat baik didalam maupun laur negeri).:

3. *Promoting knowledge management* (meningkatkan informasi dan pengetahuan dunia maya).

Tiga elemen e diplomasi digital ini penting dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia sebagai bagian dari kepentingan nasional. E diplomasi bisa digunakan untuk proses pengambilan kebijakan luar negeri sebagai *tools smart power*, sebagai upaya merespon kebijakan luar negeri di dunia maya serta melatih diplomat Indonesia dan Malaysia menggunakan teknologi. Lebih lanjut, Holmes (2015) mengatakan ada dua hal yang harus dilakukan yaitu melakukan inovasi kebijakan dan adaptasi intitusi dengan perubahan (Holmes, 2015). Karena lokasi Nusantara sangat rawan dengan ancaman makanya formulasi kebijakan luar negeri baik melalui e diplomasi dan intrumen lainya harus terintegasi teknologi sebagai *power projection*

*Power* di jaman modern terdiri dari GPS (Geografi, Populasi, dan Sumberdaya Alam). Melalui revolusi teknologi informasi, semuanya berubah menjadi telemetrik. Akhirnya dikenal konsep ISR (Informasi intelejen, Surveillance [observasi detail dari jarak jauh], dan Reconnaissance [Pengenalan ulang obyek]) dan C4I (Command, control, communications, computer processing, dan intelejen) untuk mendapatkan power relatif. Paradoks yang terjadi adalah hal ini akan mendekonstruksi keberadaan negara secara solid, sebab organisasi-organisasi hingga pribadi-pribadi mampu memiliki power tersebut. Dengan strategi ini Indonesia dan Malaysia bisa menjaga stabilitas ancaman di wilayah Nusantara dengan komprehensif. Buzan (1991) mengatakan bahwa untuk memetakan ancaman harus memenuhi syarat dan kalkulasi variabel. Respons keamanan dapat dilihat dalam beberapa dimensi, yaitu 1. “*the origin of threats*” atau asal ancaman, 2. “*the nature of threats*” atau sifat ancaman, 3 “*changing response*” atau perubahan respons, 4. “*changing responsibility of security* /atau perubahan tanggungjawab keamanan, dan 5. “*values of security*” (Yanyan Mochamand Yani, 2017). Lima dimensi ini harus diamati oleh kedua negara sebagai pedoman dalam menjaga stabilitas keamanan dan ancaman di wilayah Nusantara.

## **Kesimpulan**

Analisis terotik di atas adalah rekomendasi penulis melalui hasil kajian akademik karena melihat potensi ekonomi wilayah Nusantara yang terancam baik konteks tradisional maupun non tradisional. Penulis mengusulkan penciptaan identitas kolektif untuk memanfaatkan dan menjadikan rekomendasi penulis sebagai bahan kajian akadmeik yaitu identitas kolektif menurut perpektif Konstruktivisme. Pendekatan ini akan di arahkan pada

menganalisis pola kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam level analisis negara. Pendekatan ini akan melihat bagaimana pola konstruksi yang dibentuk oleh kedua negara dalam mencapai kepentingan masing-masing dengan berdasarkan pada ide-norma, gagasan, sejarah, dan prinsip yang telah di anut. Pendekatan ini akan menghasilkan analisis bahwa pola konstruksi kerjasama antar kedua negara tidak akan bersifat anarkis dan saling menguntungkan yang berangkat dari sejarah masing-masing yang dalam konstruktivisme dikatakan dengan *Comment fate, interdependency, homogeneity, dan self restraint*. Dengan demikian akan menghasilkan pola *partnership diplomacy* yang kreatif, inovatif dan saling menghargai sesuai dengan konstitusi negara masing-masing. konstruktivisme yang dipelopori oleh Alexander Wendt, Nicolas Onuf dan Kartocwil. Dalam dekade perkembangan pendekatan ini berfokus pada tiga hal dasar yaitu ideasional, *normative dan linguistic*. Konstruktivisme ideasional Wendt, Nina Tannenwald bahwa sistem ide mengacu pada : 1) sistem ideologis yang dimiliki bersama, 2) kepercayaan normatif (baik tidak) 3. kepercayaan sebab akibat (efektif dan tidak) 4. preskripsi kebijakan (program khusus) (Hara, 2011). Pendekatan ini memiliki domain utama bahwa di dunia ini tidak ada yang obyektif, semua adalah dikonstruksikan dalam otak manusia, dalam ide manusia. Karena dikonstruksikan manusia maka interaksi yang terjadi interaksi simbolis, sesungguhnya merupakan interaksi antar manusia, antar subyek, atau istilah sosiologi: inter subyektif meaning.

Oleh sebab itulah mengapa Indonesia perlu membentuk identitas kolektif pertimbangannya ada 4 hal yaitu 1) *Comment fate* yaitu antara Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan yang sama untuk menjaga integritas dan kedaulatan masing-masing negara yang sudah diamanatnya melalui konstitusi masing-masing serta hukum internasional. Kedua negara harus menjadikan hukum atau norma tersebut sebagai media untuk saling bersinergi dalam menyelesaikan masalah. Kepentingan nasional dan regional bisa diamankan jika actor memiliki kesamaan visi dan misi untuk bekerja bersama. Kemudian, 2) interdependensi, kedua negara adalah dua mitrastrategis di Kawasan ASEAN sehingga saling membutuhkan dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai dua negara yang memiliki etnis melayu dan bertetangga maka kedua negara harus mengedepankan kepentingan public dibandingkan kepentingan lain yang memicu konflik. Dengan kebersamaan untuk mengelola wilayah Nusantara diharapkan kedua negara bisa terus menciptakan kesamaan dan kenyamanan. Salah satu faka paling penting adalah operasi bersama dalam mengamankan selat Malaka yang disebut MASLINDO ( Malaysia, Singapura dan Indonesia) (Fathun, 2019). Artinya kedua negara memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas ancaman perompakan dan pembajakan di wilayah tersebut. Poin 3) homogeneity, hubungan bilateral kedua negara sudah mengalami dinamika,

sehingga dengan hubungan yang lama tersebut bisa menjadikan kebersamaan untuk saling memahami dan mengerti bahwa kedua negara telah terbebas dari adanya penjajahan. Sebagai negara merdeka mereka harus mandiri untuk terus berjalan mencapai kepentingan nasional. Konflik yang terjadi diantara mereka harus menjadi pembelajaran agar lebih menggunakan diplomasi sebagai komitmen kepentingan negara. Dan poin ke 4) pentingnya mengontrol ego atau *self restraint* yaitu mencari kesamaan bukan mencari perbedaan. Karena untuk menciptakan identitas kolektif harus memiliki target dan keinginan bersama bukan berjalan sendiri-sendiri. Wilayah Nusantara sangat luas sehingga tidak bisa dikerjasakan tanpa adanya bantuan. Negara dengan berbasis laut maka konsekuensi yang dipukul adalah kemampuan finansial yang banyak, kualitas sumberdaya manusia, kolaborasi internasional serta kemampuan teknologi. Kedua negara bisa berkolaborasi untuk menjaga stabilitas Nusantara sebagai komitmen perdamaian regional.

## Bibliography

- Alden, Chris . (2017). *Foreign Policy Analysis New Approaches*. London: Routledge.
- Anwar, D. F. (2020). Indonesia and the ASEAN Outlook on the Indo -Pacific . *International Affairs*, 111-129.
- Bist, M. (2020). *Kautilya 'SARTHASASTRA PHILOSOPHY OF STRATEGY* . USA: Routledga.
- Dellios, R. (2003). “*Mandala: From Sacred Origin to Sovereign Affair in Traditional Southeas Asia*” . . Queensland: Bond University: CEWCES Research Paper Paper 8. .
- Fathun, L. M. (2019). ASEAN Contemporary Security: Maritime Diplomacy in Handling of Maritime Security Threats in Malaka Strait. *Insighnia*, 50-63
- Griffiths, M. (2007). *International Relations Theory for the Twenty-First Century An introduction*. New York: Routledge.
- Hara, A. (2011). *Analisis Politik Luar Negeri Dari Realisme Sampai Konstruktivisme*. Malang: Nuansa Cendekia.
- Hayati , Sri . (2007). *Geografi Politik*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Scolarly Researches in Alled Education*, Vol.II Issue II, p.1-4.
- Holmes, C. B. (2015). *Digital Diplomact Theory and Practice* . Nwe York: Routledge .
- Holsti, K. (2016). . : *A Pioneer n International Relations Theory, Foreign Policy Analysis, History of International Order, and Security Studies* . London: Springer.
- Hone, J. K. (2021). *2021 The Emergence DigitalForeign Policy*. Mlta: Diplo Foundation Anutruf .
- Isnarti,Rika dan Fathun , Laode Muhamad (Ed) (2021). *Tinjauan Multi Perspektif Kawasan Indo Pasifik Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu .

- Komeini, Yugolastarob dan Fathun, Laode Muhamad (Ed). (2018). *Keamanan Kontemporer di Kawasan Asia Tenggara*. Yogyakarta: Sulu Media.
- Muzakki, F. (2019). Indonesia dalam Belt Road Initiative. In L. M. Fathun, *Kebijakan Luar Negeri Indonesia dan Tiongkok dalam Perpektif Konstruktivisme* (p. 32). Jakarta: PPI Tiongkok.
- Rajeev. (2011). Inter- State Relations in Kautilyan Arthasastra. *Journal of Advances and*
- Rosenau, J. (1971). *Scientific Study Of Foreign Policy*. New York: Free Press.
- Shahi, D. (2019). *Kautilya and Non Western IR Theory*. USA: Palgrave macmilln .
- Suprianto, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tuathail, G. E. (1998). *The Geopolitics Raeder*. London: Routledge.
- Venus, A. (2015). *Filsafat Komunikasi Orang Melayu*. Jakarta: Simbiosis Rekatama Media.
- Warsito, T. (1998). *Teori-Teori Politik Luar Negeri, Relevansi dan Keterbatasannya*. Yogyakarta.: BIGRAF Publishing.
- Yanyan Mochamand Yani, I. M. (2017). *Pengantar Studi Keamanan*. Jakarta: Intrans.
- .